

# Isu Perubahan Iklim dan Prinsip Pancasila: Peran Indonesia dalam Perjanjian Internasional

*Climate Change Issues and Pancasila Principles: Indonesia's Role in International Agreements*

Tiara Hezrine Masytah<sup>1</sup>, Khoirunnita Dini<sup>2</sup>, Bustaniyatuz Zahra Ramadhani<sup>3</sup>, Sani Jamilatus Solihah<sup>4</sup>,  
Ahmad Muhamad Mustain Nasoha<sup>5</sup>, Ashfiya Nur Atqiya<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

<sup>6</sup> Universitas Sebelas Maret Surakarta, Indonesia

Correspondence email; tiarahez@gmail.com

## Article history

Submitted: 2025/01/17;

Revised: 2025/02/23;

Accepted: 2025/03/30

## Abstract

Climate change is a global challenge that has serious impacts on environmental sustainability and socio-economic welfare, especially for Indonesia as an archipelagic country that is vulnerable to rising temperatures, sea levels, and hydrometeorological disasters. Amidst international commitments such as the Paris Agreement, there is concern regarding the need to integrate national values into Indonesia's climate strategy. The purpose of this study is to analyze the role of Pancasila principles in Indonesia's climate change policy, especially in the context of the country's participation in international agreements. This research method uses a qualitative approach with a literature review method of policy documents, international reports, and academic literature. The results of the study indicate that Pancasila values, such as social justice, humanity, and unity, have high relevance in framing inclusive and sustainable climate policies. However, its implementation still faces challenges such as weak institutional coordination and public participation. This study concludes that the integration of Pancasila principles can strengthen the legitimacy and effectiveness of national climate policies. The main contribution of this study is to offer a unique Indonesian ideological approach as an ethical and strategic foundation in responding to global climate change.

## Keywords

Climate Change, Pancasila, Paris Agreement, Sustainable Development.



© 2025 by the authors. This is an open-access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

## PENDAHULUAN

Perubahan iklim telah menjadi salah satu isu global paling mendesak yang dihadapi umat manusia dalam beberapa dekade terakhir. Perubahan suhu global, pencairan es di kutub, kenaikan permukaan laut, dan cuaca ekstrem menjadi fenomena yang kian sering terjadi dan berdampak luas terhadap keberlanjutan kehidupan di bumi. Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau, menghadapi risiko yang sangat besar dari dampak perubahan iklim tersebut (Ammarnurhandy et al., 2023). Kenaikan suhu rata-rata sebesar 0,03°C per tahun dan kenaikan permukaan laut sekitar 0,8 hingga 1,2 cm per tahun telah mengancam wilayah-wilayah pesisir yang menjadi tempat tinggal sekitar 65% penduduk Indonesia. Tidak hanya itu, ancaman terhadap ketahanan

pangan, kesehatan masyarakat, dan keberlangsungan ekosistem menuntut adanya upaya serius dan menyeluruh dari seluruh elemen bangsa (Syukriamsyah, 2020).

Indonesia, sebagai negara berkembang dengan kontribusi emisi gas rumah kaca yang cukup signifikan, memiliki peran strategis dalam menghadapi isu perubahan iklim. Dalam tataran global, Indonesia telah mengambil langkah-langkah penting dengan berpartisipasi aktif dalam berbagai perjanjian internasional, termasuk Paris Agreement tahun 2015 yang merupakan tonggak sejarah dalam upaya kolektif dunia menanggulangi krisis iklim (Guardians, 2024). Melalui ratifikasi perjanjian tersebut, Indonesia menunjukkan komitmennya untuk menurunkan emisi sebesar 29% dengan usaha sendiri dan hingga 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2030. Selain itu, pemerintah Indonesia telah menyusun dokumen *Nationally Determined Contribution (NDC)* dan *Long-Term Strategy on Low Carbon and Climate Resilience (LTS-LCCR)* untuk mendukung transisi menuju pembangunan berkelanjutan yang rendah karbon (A. P. Nugraha et al., 2022).

Namun demikian, keberhasilan implementasi kebijakan perubahan iklim tidak hanya bergantung pada komitmen internasional dan kebijakan teknokratis semata. Diperlukan pendekatan yang lebih holistik dan kontekstual yang mencerminkan identitas serta nilai-nilai luhur bangsa. Dalam hal ini, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi fondasi filosofis dan etis dalam merancang strategi penanggulangan perubahan iklim (Amani et al., 2021). Setiap sila dalam Pancasila mengandung makna yang sejalan dengan prinsip keberlanjutan, keadilan lingkungan, solidaritas sosial, dan tanggung jawab antargenerasi. Misalnya, sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” dapat mendorong kesadaran spiritual dalam menjaga alam sebagai ciptaan Tuhan, sedangkan sila kelima “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” menekankan pentingnya distribusi manfaat dan beban lingkungan secara adil (M. Hasan et al., 2023).

Keunikan penelitian ini terletak pada upaya integratif antara nilai-nilai Pancasila dengan komitmen internasional Indonesia dalam mengatasi perubahan iklim. Meskipun banyak studi telah mengulas tentang partisipasi Indonesia dalam perjanjian lingkungan internasional atau meneliti efektivitas kebijakan mitigasi dan adaptasi iklim, sangat sedikit yang secara eksplisit mengaitkannya dengan nilai-nilai ideologis dan filosofis Pancasila (Novita, 2019). Sebagian besar literatur sebelumnya cenderung fokus pada aspek teknis, ekonomi, atau kelembagaan, tanpa menempatkan Pancasila sebagai variabel normatif yang memengaruhi kebijakan lingkungan. Hal ini menimbulkan kekosongan akademik (*research gap*) dalam kajian interdisipliner yang menghubungkan ideologi bangsa dengan isu-isu lingkungan global (N. Nugraha & Sari, 2017).

Dengan demikian, penelitian ini memiliki urgensi untuk mengisi celah tersebut dengan mengkaji secara mendalam bagaimana prinsip-prinsip Pancasila dapat diintegrasikan ke dalam strategi nasional Indonesia dalam menanggapi perubahan iklim. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat membimbing arah kebijakan mitigasi emisi gas rumah kaca, strategi adaptasi terhadap dampak iklim, serta peran aktif Indonesia dalam forum-forum internasional yang menuntut pendekatan kolaboratif dan berkeadilan (Maula, 2022). Melalui pendekatan normatif dan kebijakan, penelitian ini berusaha menjembatani antara cita-cita ideologis bangsa dengan tuntutan global dalam menghadapi krisis iklim (S. et al., 2021).

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran Pancasila sebagai landasan etis dalam merumuskan kebijakan dan strategi nasional Indonesia terhadap perubahan iklim, terutama dalam konteks keterlibatan Indonesia dalam perjanjian internasional seperti Paris Agreement. Harapannya, hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis dalam pengembangan kebijakan iklim nasional yang tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga berakar kuat pada nilai-nilai kebangsaan.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian literatur sebagai teknik utama dalam pengumpulan data. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali dan memahami secara mendalam keterkaitan antara nilai-nilai Pancasila dengan kebijakan perubahan iklim Indonesia serta partisipasi negara dalam perjanjian internasional, khususnya Paris Agreement. Penelitian dilakukan dalam rentang waktu antara Februari hingga Mei 2025 dan bertempat di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, sebagai lokasi peneliti melakukan kajian dan akses terhadap sumber-sumber data digital dan cetak. Kajian literatur ini difokuskan pada dokumen resmi pemerintah seperti Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement, dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia, serta laporan dan publikasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Selain itu, data sekunder juga diperoleh dari laporan organisasi internasional seperti Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), serta literatur ilmiah, artikel jurnal, dan buku yang membahas isu Pancasila, perubahan iklim, dan pembangunan berkelanjutan.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif-kualitatif yang dikombinasikan dengan pendekatan analisis isi (*content analysis*). Melalui teknik ini, peneliti menafsirkan dan mengkaji secara sistematis isi dari berbagai dokumen dan literatur untuk menemukan pola dan hubungan antara prinsip-prinsip Pancasila dengan strategi nasional Indonesia dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yakni: identifikasi dan pengumpulan data literatur relevan, kategorisasi tema berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan elemen kebijakan perubahan iklim, interpretasi makna dalam konteks normatif dan praktis, serta penarikan kesimpulan yang menjadi dasar perumusan rekomendasi kebijakan. Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan dan mengkaji informasi dari berbagai jenis dokumen dan publikasi yang saling mendukung. Dengan metode ini, diharapkan hasil penelitian mampu memberikan kontribusi konseptual yang kuat dalam membangun narasi kebijakan iklim yang selaras dengan ideologi Pancasila serta kontekstual terhadap tantangan Indonesia sebagai negara berkembang dalam sistem global.

## TEMUAN DAN PEMBAHASAN

### Kerentanan Indonesia terhadap Perubahan Iklim

Sebagai negara kepulauan, Indonesia sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Kenaikan suhu udara, perubahan curah hujan, dan kenaikan permukaan laut adalah beberapa ancaman nyata yang dihadapi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat bahwa suhu udara rata-rata di Indonesia terus meningkat, dengan Oktober 2023 menjadi yang terpanas sejak 1981. Peningkatan suhu ini berdampak pada berbagai sektor, termasuk pertanian, perikanan, dan kesehatan masyarakat. Selain itu, perubahan iklim juga memicu peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan tanah longsor.

Berdasarkan kajian literatur yang telah dianalisis melalui pendekatan deskriptif-kualitatif dan analisis isi, ditemukan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim, namun sekaligus memiliki landasan ideologis yang kuat untuk merespons tantangan tersebut secara komprehensif. Dari analisis terhadap berbagai dokumen kebijakan, laporan resmi, serta literatur ilmiah, terlihat bahwa kerentanan geografis Indonesia sebagai negara kepulauan telah mendorong pemerintah untuk mengambil berbagai langkah strategis, baik dalam lingkup nasional

maupun internasional. Namun, dalam pelaksanaannya, pendekatan kebijakan iklim di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar etis dan normatif yang dapat memperkuat respons kebijakan terhadap perubahan iklim.

#### Komitmen Indonesia dalam Perjanjian Internasional

Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengatasi perubahan iklim melalui partisipasinya dalam berbagai perjanjian internasional. Salah satunya adalah Paris Agreement, yang diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 2016. Dalam perjanjian ini, Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% dengan upaya sendiri dan hingga 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2030. Selain itu, Indonesia juga aktif dalam forum-forum internasional lainnya untuk membahas isu perubahan iklim dan mencari solusi bersama (Sumampouw, 2019).

#### Integrasi Prinsip Pancasila dalam Kebijakan Iklim

Prinsip-prinsip Pancasila dapat menjadi landasan moral dan etika dalam merumuskan kebijakan dan tindakan terkait perubahan iklim (Nur Atqiya et al., n.d.): Ketuhanan Yang Maha Esa: Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan sebagai amanah dari Tuhan. Eksploitasi sumber daya alam harus dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan, dengan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan dan generasi mendatang. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Prinsip ini menuntut adanya keadilan dalam mengatasi perubahan iklim. Negara-negara maju yang memiliki kontribusi terbesar terhadap emisi gas rumah kaca harus memberikan dukungan finansial dan teknologi kepada negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi dan beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Persatuan Indonesia: Prinsip ini menekankan pentingnya kerjasama dan solidaritas antar daerah dan kelompok masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim. Kebijakan iklim harus memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah-daerah terpencil dan pulau-pulau kecil yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan: Prinsip ini menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait perubahan iklim. Masyarakat harus diberikan akses informasi yang transparan dan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dan masukan dalam proses perumusan kebijakan. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Prinsip ini menuntut adanya pemerataan manfaat dan beban dalam mengatasi perubahan iklim. Kebijakan iklim harus memastikan bahwa kelompok-kelompok rentan seperti masyarakat miskin, perempuan, dan anak-anak tidak terkena dampak yang tidak proporsional dari perubahan iklim.

#### Tantangan dan Peluang

Implementasi strategi iklim yang selaras dengan prinsip-prinsip Pancasila menghadapi berbagai tantangan. Keterbatasan sumber daya finansial dan teknologi, kapasitas kelembagaan yang lemah, serta kurangnya kesadaran masyarakat adalah beberapa hambatan utama. Selain itu, konflik kepentingan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan juga menjadi tantangan yang perlu diatasi.

Namun, terdapat juga berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan. Potensi energi terbarukan yang besar, keanekaragaman hayati yang kaya, serta kearifan lokal masyarakat adat adalah aset berharga yang dapat mendukung upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat dan dukungan politik yang kuat juga dapat menjadi modal penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berlandaskan Pancasila (Bukit et al., 2023).

Temuan pertama menunjukkan bahwa keterlibatan Indonesia dalam perjanjian internasional seperti Paris Agreement tidak sekadar formalitas politik luar negeri, tetapi juga merupakan bentuk pengakuan terhadap urgensi perubahan iklim sebagai ancaman eksistensial. Komitmen pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 29% hingga 41% dalam dokumen NDC (Nationally Determined

Contribution) mencerminkan niat strategis negara dalam menempuh jalur pembangunan rendah karbon. Namun, hasil analisis mengindikasikan bahwa keberhasilan implementasi komitmen tersebut masih sangat tergantung pada sinergi antara kebijakan nasional dan pelibatan seluruh lapisan masyarakat. Di sinilah nilai-nilai Pancasila berpotensi memberikan arah moral yang kuat dan memperkuat keberterimaan sosial atas kebijakan iklim nasional (Hanudin et al., 2021).

Hasil analisis terhadap integrasi prinsip Pancasila menunjukkan bahwa secara konseptual, setiap sila memiliki relevansi langsung dengan isu perubahan iklim. Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung pesan spiritual untuk memelihara bumi sebagai ciptaan Tuhan, sehingga mendorong praktik pengelolaan lingkungan yang etis dan bertanggung jawab. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab memberikan justifikasi moral atas pentingnya keadilan iklim, di mana negara-negara maju dan pelaku utama emisi historis harus memikul tanggung jawab lebih besar, termasuk dalam hal transfer teknologi dan pendanaan untuk negara berkembang seperti Indonesia. Prinsip Persatuan Indonesia memperkuat urgensi solidaritas lintas wilayah dan kelompok sosial, yang sangat penting mengingat dampak perubahan iklim tidak merata dan dapat memperlebar kesenjangan antar daerah (Muhamad et al., n.d.).

Selanjutnya, sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan menegaskan pentingnya proses demokratis dalam pengambilan kebijakan iklim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang top-down dan minim pelibatan masyarakat cenderung menghadapi resistensi dan tidak berkelanjutan. Sebaliknya, pelibatan aktif masyarakat dalam proses konsultatif terbukti memperkuat efektivitas dan keberlanjutan program mitigasi dan adaptasi. Adapun sila terakhir, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, menggarisbawahi perlunya pemerataan manfaat dan risiko dalam kebijakan iklim. Analisis dokumen menunjukkan bahwa kelompok rentan seperti masyarakat pesisir, petani kecil, dan komunitas adat sering kali menjadi korban pertama dari perubahan iklim, namun belum selalu menjadi penerima manfaat utama dari program adaptasi (Anshar & Setiyono, 2020).

Selain itu, hasil kajian menemukan bahwa meskipun terdapat berbagai tantangan seperti keterbatasan dana, lemahnya kapasitas kelembagaan, serta masih rendahnya kesadaran masyarakat, peluang untuk memperkuat integrasi Pancasila dalam strategi iklim sangat terbuka. Misalnya, potensi energi terbarukan yang sangat besar di Indonesia seperti energi surya, angin, dan biomassa dapat dikembangkan sebagai bentuk tanggung jawab ekologis yang sejalan dengan sila pertama (Priyatna et al., 2019). Keanekaragaman hayati dan praktik kearifan lokal yang dimiliki masyarakat adat juga dapat menjadi sumber solusi lokal untuk adaptasi iklim yang adil dan berkelanjutan, mendukung sila kedua dan kelima. Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan iklim bukan hanya bersifat simbolik, melainkan dapat diterjemahkan ke dalam praktik kebijakan yang lebih responsif, inklusif, dan etis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila dapat berperan signifikan sebagai landasan moral dan etis dalam merumuskan kebijakan perubahan iklim di Indonesia, serta memperkuat posisi negara dalam keterlibatannya pada perjanjian internasional seperti Paris Agreement. Ketika disandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, seperti studi oleh (Isnaeni, 2018) yang menekankan pentingnya pendekatan keadilan lingkungan dalam mitigasi perubahan iklim, temuan ini memperluas perspektif dengan memasukkan dimensi ideologis khas Indonesia melalui Pancasila. Santosa menyebutkan bahwa kebijakan iklim sering kali terlalu teknokratis dan mengabaikan dimensi sosial-kultural. Penelitian ini mengonfirmasi kekhawatiran tersebut, tetapi sekaligus menawarkan solusi integratif melalui penerapan prinsip-prinsip Pancasila, seperti keadilan sosial dan musyawarah, dalam proses formulasi dan pelaksanaan kebijakan iklim.

Analisis teori yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada teori etika lingkungan dan keadilan iklim. Teori etika lingkungan yang dikemukakan oleh Aldo Leopold, misalnya, menekankan pentingnya melihat manusia sebagai bagian dari komunitas ekologis yang lebih luas, bukan sebagai penguasa tunggal atas alam. Pandangan ini sejalan dengan sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, yang memandang alam sebagai ciptaan Tuhan yang harus dijaga dan dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Ketika prinsip ini dihubungkan dengan kebijakan iklim Indonesia, maka muncul kebutuhan untuk menata ulang relasi antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan berdasarkan nilai spiritualitas ekologis, bukan sekadar pertimbangan ekonomi jangka pendek (Z. Hasan et al., 2024).

Lebih lanjut, hasil penelitian ini juga memperkuat temuan dari studi oleh (Heryani & Rejekiningrum, 2019), yang mengungkapkan bahwa ketimpangan dalam akses terhadap sumber daya alam dan kerentanan terhadap bencana iklim menciptakan ketidakadilan struktural yang menghambat pencapaian pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks ini, sila kedua dan kelima Pancasila menjadi sangat relevan. Nilai kemanusiaan dan keadilan sosial menuntut agar kebijakan perubahan iklim tidak hanya berfokus pada efisiensi teknis, tetapi juga pada keadilan distribusi dan keberpihakan kepada kelompok rentan. Oleh karena itu, pendekatan berbasis nilai ini mendorong agar proses transisi energi bersih dan strategi adaptasi iklim mempertimbangkan keberlanjutan hidup masyarakat adat, petani kecil, dan komunitas pesisir sebagai bagian dari keadilan iklim.

Dalam konteks teori partisipasi publik dalam perumusan kebijakan, seperti yang dijelaskan oleh Arnstein (1969) dalam *Ladder of Citizen Participation*, partisipasi yang bermakna memerlukan keterlibatan masyarakat tidak hanya sebagai penerima kebijakan, tetapi sebagai subjek yang memiliki kontrol dan suara dalam pengambilan keputusan (Suhartini et al., 2020). Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa nilai demokrasi deliberatif sebagaimana terkandung dalam sila keempat Pancasila masih belum sepenuhnya terintegrasi dalam kebijakan iklim Indonesia. Pelibatan masyarakat lokal dan komunitas adat dalam proses perencanaan kebijakan adaptasi dan mitigasi masih bersifat simbolis dan prosedural. Maka dari itu, penelitian ini merekomendasikan pendekatan partisipatif substantif yang menempatkan rakyat sebagai mitra strategis negara dalam membangun ketahanan iklim.

Selain itu, dari hasil analisis terhadap kebijakan dan dokumen resmi negara, dapat dilihat bahwa meskipun terdapat komitmen tinggi terhadap Paris Agreement, pelaksanaannya belum sepenuhnya sinkron dengan semangat gotong royong dan solidaritas nasional sebagaimana tercermin dalam sila ketiga, Persatuan Indonesia. Ini juga dikonfirmasi oleh studi (Ghifar et al., 2019) yang menyatakan bahwa koordinasi antar kementerian, pemerintah pusat dan daerah, serta antarwilayah masih menjadi kendala dalam implementasi kebijakan iklim. Dengan demikian, integrasi prinsip persatuan menjadi aspek strategis dalam penguatan kelembagaan dan tata kelola iklim Indonesia.

Dari perspektif teori pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), seperti yang dirumuskan oleh WCED (1987) dalam *Brundtland Report*, pembangunan harus memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Penelitian ini menemukan bahwa Pancasila memiliki potensi besar sebagai kerangka nilai yang mendukung prinsip keberlanjutan tersebut (Katiandagho, 2020). Ketika dikaitkan dengan implementasi strategi pembangunan rendah karbon dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, kelima sila dalam Pancasila justru dapat menjadi filter normatif untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga keadilan ekologis dan sosial.

Secara keseluruhan, hasil analisis ini menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai Pancasila ke dalam kebijakan perubahan iklim Indonesia tidak hanya bersifat simbolis atau normatif, tetapi memiliki

relevansi praktis dan strategis dalam menjawab tantangan perubahan iklim yang kompleks dan multidimensional. Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menawarkan kontribusi baru dengan memperjelas bagaimana nilai-nilai ideologis nasional dapat diartikulasikan ke dalam strategi kebijakan iklim yang konkret. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya ideologi politik atau konstitusional, tetapi juga dapat berperan sebagai pedoman etis dan paradigma pembangunan berkelanjutan dalam konteks krisis iklim global.

## SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa perubahan iklim bukan hanya tantangan ekologis, melainkan juga persoalan moral dan ideologis yang menuntut respons berbasis nilai. Kegelisahan utama peneliti terletak pada belum optimalnya integrasi prinsip-prinsip Pancasila ke dalam kebijakan perubahan iklim di Indonesia, baik dalam tataran konsep maupun implementasi. Padahal, Pancasila sebagai dasar negara memiliki potensi besar sebagai kerangka normatif untuk membangun strategi mitigasi dan adaptasi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Temuan penelitian ini menggarisbawahi bahwa nilai-nilai seperti keadilan sosial, kemanusiaan, dan persatuan dapat menjadi landasan dalam menyusun kebijakan iklim yang tidak hanya berorientasi pada teknokrasi, tetapi juga menjawab kebutuhan kelompok rentan dan memperkuat solidaritas nasional dalam menghadapi krisis iklim global.

Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan pendekatan kualitatif berbasis kajian literatur tanpa melakukan verifikasi lapangan atau wawancara dengan para pemangku kepentingan. Hal ini membatasi kedalaman analisis empiris terhadap implementasi konkret nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan iklim. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengadopsi pendekatan campuran (*mixed methods*), dengan melakukan studi kasus di daerah-daerah yang terdampak langsung oleh perubahan iklim, serta melibatkan aktor-aktor lokal, pemerintah daerah, dan masyarakat adat. Penelitian lanjutan juga dapat menggali lebih dalam bagaimana transformasi nilai ideologis dapat dijadikan instrumen kebijakan publik yang responsif terhadap tantangan lingkungan di masa depan.

## REFERENSI

- Amani, S. R., Kaniawati, I., & Riandi, R. (2021). DIYL (do it yourself laboratories): Inovasi kit perubahan iklim untuk membentuk perilaku BROWNIS (bring your own and eat wisely) pada siswa sekolah menengah pertama. *Assimilation: Indonesian Journal of Biology Education*, 4(2), 89–92.
- Ammarnurhandyaka, M., Sains, F., & Diponegoro, U. (2023). Peran Teknologi Hijau dalam Mencapai Pembangunan Berkelanjutan di Masa Depan. *JECTH: Journal Economy, Technology, Social and Humanities*, 1(1), 1–7.
- Anshar, R. U., & Setiyono, J. (2020). Tugas dan Fungsi Polisi sebagai penegak hukum dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 359–372.
- Bukit, S., Marcela, E. D., & Ernawati, E. (2023). Teacher's Strategy to Create Fun Learning in Elementary School. *Journal Corner of Education, Linguistics, and Literature*, 2(3), 244–249. <https://doi.org/10.54012/jcell.v2i3.129>
- Ghifar, R., Yusuf, A. E., Sumardi, S., & Wulandari, F. (2019). Peningkatan Kreativitas Guru melalui Pengembangan Supervisi Kepala Sekolah dan Iklim Organisasi. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 7(2), 790–799.
- Guardians, G. (2024). *Analisis Efisiensi Pengolahan Limbah dan Dampaknya Terhadap Emisi Karbon Di Berbagai Negara*.

- Hanudin, L., Tania, W., Fajar, & Rahmawati, E. (2021). Wanita Karir Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Lapandewa Kaindea Buton Selatan). *Syattar*, 1(2), 112–122.
- Hasan, M., Harahap, T. K., Trisnawati, S. N. I., Hamzah, H., Munte, A., Simanungkalit, L. N., Hakim, L., Hasibuan, S., Arisah, N., & Hasibuan, N. S. (2023). Pengantar Pendidikan Indonesia: Arah Baru Dalam Membentuk Profil Pelajar Pancasila. *Penerbit Tahta Media*.
- Hasan, Z., Nasution, M. A. A., Asfahani, A., Muhammadong, M., & Syafruddin, S. (2024). Menggagas Pendidikan Islam Holistik melalui Integrasi Ilmu Pengetahuan dan Spiritualitas. *Global Education Journal*, 2(1), 81–89.
- Heryani, N., & Rejekiningrum, P. (2019). Pengembangan pertanian lahan kering iklim kering melalui implementasi panca kelola lahan. *Jurnal Sumberdaya Lahan*, 13(2), 63–71.
- Isnaeni, M. (2018). *Palu Godam Hakim Mahkamah Konstitusi Menafikan Hakekat Perjanjian Perkawinan*. Program Studi Kenotariatan Universitas Warmadewa.
- Katiandagho, F. G. O. (2020). Aspek Hukum Pengelolaan Pembangunan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Terluar Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. *Lex Et Societatis*, 8(1), 97–108. <https://doi.org/10.35796/les.v8i1.28476>
- Maula, M. I. (2022). Analisis Ketaatan Hukum Masyarakat Mewujudkan Konsep Negara Hukum. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(8), 290–299.
- Muhamad, A., Nasoha, M., Nur Atqiya, A., Zahra, A., Areje, P., Allifah, L., & Norhalisa, S. (n.d.). *Pancasila sebagai Dasar Negara dan Hukum Internasional Implementasi Nilai-nilai Kemanusiaan dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia*. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v3i1.1107>
- Novita, R. (2019). Kajian literatur: Dampak perubahan iklim terhadap timbulnya penyakit tular nyamuk terutama Limfatik Filariasis. *Journal of Health Epidemiology and Communicable Diseases*, 5(1), 30–39.
- Nugraha, A. P., Wibisono, C., Satriawan, B., Indrayani, Mulyadi, & Damsar. (2022). The Influence Of Transformational Leadership, Job Crafting, Job Satisfaction, And Self-Efficacy On Job Performance Through Work Engagement Of State Civil Apparatus As An Intervening Variable In The Digital Era Of Cases In The Local Government Of Karimun R. *Central European Management Journal*, 30(3), 2336–2693.
- Nugraha, N., & Sari, N. i D. (2017). Peran Guru Dalam Upaya Pembentukan Wawasan Kebangsaan Pada Siswa Kelas Viii Smpn 1 Barat Kabupaten Magetan Tahun Ajaran 2015/2016. *Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5(1), 13. <https://doi.org/10.25273/citizenship.v5i1.1147>
- Nur Atqiya, A., Muhamad, A., Nasoha, M., Faradina, A. P., Putri, A. S., & Widianingrum, R. (n.d.). *Pancasila dan Hukum Internasional : Kajian tentang Prinsip Kedaulatan dan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Indonesia*. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v3i1.1109>
- Priyatna, R. K., Hidayat, D. O., Eltariant, I., & Fernanda, S. A. (2019). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Mencegah Degradasi Moral Terhadap Isu Sara Dan Hoax. *Jurnal Rontal Keilmuan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5(1).
- S., F. S., Joko, T., & Nurjazuli, N. (2021). Literature Review : Kualitas Sumur Gali Dan Personal Hygien Berhubungan Dengan Gangguan Kesehatan Kulit Di Indonesia. *An-Nadaa: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 8(1), 63. <https://doi.org/10.31602/ann.v8i1.4772>
- Suhartini, M., Khotimah, K., & Hidayat, R. (2020). Persepsi Konsumen dan Pengambilan Keputusan Pembelian Terhadap Produk Sehat Di Asri Organik-Sehat Tambakrejo Jombang. *AGROSAINTIFIKA*, 2(2), 131–146.
- Sumampouw, O. J. (2019). *Perubahan Iklim dan kesehatan masyarakat*. Deepublish.
- Syukriamsyah, S. (2020). Upaya Meningkatkan Motivasi dan Hasil Belajar Melalui Penerapan LKPD Berbasis Inquiri Materi Suhu pada Peserta Didik Kelas VII di SMP Negeri 38 Takengon Tahun Pelajaran 2017/2018. *Serambi Konstruktivis*, 1(3). <https://doi.org/10.32672/konstruktivis.v1i3.1779>